

Data Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, Pihak Ketiga/Swasta, Kementerian, Lembaga berbadan Hukum

NO	Kerjasama Daerah/ Pihak ke III, Kementerian, Lembaga berbadan hukum	Pemrakarsa	Terpayungi Dalam Dokumen Perencanaan Alokasi Anggaran APBN/APBD	Bentuk Kerjasama/ Kesepakatan/ Perjanjian Kerjasama	Nomor/tanggal Kesepakatan Bersama	Ruang Lingkup	Difasilitasi oleh Kementerian/ Tim Koordinasi kerjasama Daerah	Realisasi Fisik/Keuangan	Permasalahan	Solusi	Keterangan /jangka waktu
1.	UPTD KPH Mamasa Barat dengan PT Kencana Hijau Bina Lestari	Dinas Kehutanan	-	Perjanjian Kerjasama Penyadapan getah pinus antara UPTD KPH Mamasa Barat dengan PT. Kencana Hijau Binalestari Kabupaten	415.4/071/KPH-MB/IV/2017 dan 028/kPBL-KPH/SB-MB/IV/2018 Tanggal 5 Maret 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan</li> <li>• Sosialisasi pengelolaan/penyadapan sarana dan prosarana</li> <li>• Peningkatan keterampilan tenaga penyadapan getah pinus melalui pelatihan</li> <li>• Pelaksanaan</li> </ul>	Pemerintah Daerah (APL)	-	-	-	20 (dua puluh) Tahun etrhitung mulai tanggal ditandatangani PKS

				Mamasa		penyardapan getah pinus penungutan HHBK lainnya <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan produk getah pinus</li> <li>• Pengangkutan/Pe masaran</li> <li>• Perlindungan dan pengamanan hutang</li> <li>• Rehabilitasi dan pengayaan tanaman/tegakan pinus</li> </ul>					
2	UPTD KPH Mamasa Tengah dengan PT Kencana Hijau Bina Lestari	Dinas Kehutanan	-	Perjanjian Kerjasama Penyardapan getah pinus antara UPTD KPH Mamasa Tengah dengan PT. Kencana Hijau Binalestari Kabupaten Mamasa	415.4/33/KPH-MB/IV/2017 dan 028/kPBL-KPH/SB-MTB/IV/2018 Tanggal 5 Maret 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan</li> <li>• Sosialisasi pengelolaan/penyardapan sarana dan prosarana</li> <li>• Peningkatan keterampilan tenaga penyardapan getah pinus melalui pelatihan</li> <li>• Pelaksanaan penyardapan getah pinus penungutan HHBK lainnya</li> <li>• Pengelolaan produk getah pinus</li> <li>• Pengangkutan/Pe masaran</li> <li>• Perlindungan dan pengamanan hutang</li> <li>• Rehabilitasi dan pengayaan tanaman/tegakan pinus</li> </ul>	Pemerintah Daerah (APL)	-	-	-	20 (dua puluh) Tahun
3.	UPTD KPH Mamasa Timur dengan PT Kencana Hijau Bina Lestari	Dinas Kehutanan	-	Perjanjian Kerjasama Penyardapan getah pinus antara UPTD KPH Mamasa Timur dengan PT. Kencana Hijau Binalestari	029/74/KPH-MASTIM/IV/2017 dan 030/KHBL-KPH/SB-MTI/IV/2017 tanggal 5 Maret 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan</li> <li>• Sosialisasi pengelolaan/penyardapan sarana dan prosarana</li> <li>• Peningkatan keterampilan tenaga penyardapan getah pinus melalui</li> </ul>	Pemerintah Daerah (APL)	-	-	-	20 (dua puluh) Tahun

				Kabupaten Mamasa		<ul style="list-style-type: none"> <li>• pelatihan</li> <li>• Pelaksanaan penyadapan getah pinus penungutan HHBK lainnya</li> <li>• Pengelolaan produk getah pinus</li> <li>• Pengangkutan/Pe masaran</li> <li>• Perlindungan dan pengamanan hutang</li> <li>• Rehabilitasi dan pengayaan tanaman/tegakan pinus</li> </ul>					
4.	Dirjen Pengendalian DAS dan HL dengan PT Kencana Hijau Bina Lestari	Dinas Kehutanan	-	Perjanjian Kerjasama pemungutan getah pinus pada kesatuan lindung unit VIII Mamasa Tengah Provinsi Sulawesi Barat dengan PT. Kencana Hijau Bina Lestari Kabupaten Mamasa	PKS.17/DASHL/SET/KUM.3/12/2018 Tanggal 7 Desember 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaturan kelestarian hasil</li> <li>• Pemungutan getah pinus</li> <li>• Penatausahaan hasil hutan (getah pinus)</li> <li>• Perlindungan f dan pengamanan hutan</li> <li>• Pemberdayaan masyarakat setempat</li> <li>• Bagi hasil pemanfaatan hasil hutan bukan kayu</li> <li>• Pembayaran PNBK</li> <li>• Pelaporan pelaksanaan kerjasama</li> </ul>	Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (dalam Kawasan)	-	-	-	5 (lima ) Tahun
5.	Dirjen Pengendalian DAS dan HL dengan PT Kencana Hijau Bina Lestari	Dinas Kehutanan	-	Perjanjian Kerjasama Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Unit IX Mamasa Timur Provinsi Sulawesi Barat dengan PT.	PKS.1/PDAHL/KP HL/KUM.3/1/2020 003/DIR-KHBL/I/2020 Tanggal 14 Januari 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan hutan</li> <li>• Pola bagi hasil</li> <li>• PKS Operasional</li> <li>• pelaporan</li> </ul>	Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (dalam Kawasan)	-	-	-	5 (Lima) Tahun

				Kencana Hijau Bina Lestari Kabupaten Mamasa							
9.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin	DTPHP	APBD	MoU/PKS tentang penyusunan Peta Geospasial Perluasan sawah di Provinsi Sulawesi Barat TA 2023	3804.00/201/vii/S PK/2023 dan 14553/UN4.20/HK .07.00/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• penyusunan kajian sederhana pemanfaatan kegiatan perluasan sawah Focus Group Discusion hasil kegiatan pemetaan geospasial perluasan sawah</li> </ul>	Unhas	-	-	-	1 Tahun
10.						<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>					
11	Pemerintah Provinsi	Biro Hukum / Kajati Sulbar	Tidak Tepanyungi	Perjanjian Kerjasama	01/Ps6/Gs.1/01/2 022 dan 1 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelesaian Penanganan</li> </ul>	Biro hokum pemprov	-	Kurangnya proaktif dari	Perlunya	2 Tahun

	Sulawesi Barat dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat		dalam Dokumen Perencanaan	antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat tentang Penanganan Masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	2022 tanggal 20 januari 2022	Perkara • Pemberian bantuan hukum yaitu menugaskan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha Negara untuk mewakili Pihak Kesatu berdasarkan surat kuasa khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun nonlitigasi • Pembarian bantuan hukum yaitu menugaskan Jaksa pengacara Negara untuk memeberikan pendapat hukum (Legal Opinion/LO) dan atau Pendampingan (Legal Assistance?LA) dibidang perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan pihak Kesatu • Tindakan hukum lain yaitu menugaskan JPN untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Pihak Kesatu dengan lembaga Negara, instansi pemerintah	Sulbar den konsultasi dengan Biro Hukum Kemendagri		pemerintah daerah	upaya prventif masala h hukum yang timbul	
--	---	--	------------------------------	--	---------------------------------	---	--	--	----------------------	---	--

						pusat/daerah, BUMN/BUMD dibidang perdata dan TUN					
12	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan BSSN	Diskominfo/Dnas Perpustakaan	-	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Sandi Negara tentang Pemanfaatan Sertifikasi Elektronik Pada Sistem Elektronik Srikandi	2 Tahun 2022 PERI.96/BSSN/B S/HK.07.02/06/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan Infrastruktur dan teknologi informasi yang mendukung sertifikat elektronik pada layanan pemerintah</li> <li>• Penyerahan sertifikat elektronik</li> <li>• Pemanfaatan sertifikat elektronik dalam sistem elektronik pemerintah pada pihak kesatu</li> <li>• Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia</li> </ul>	Tim TKKSD Provinsi dan BSSN	-	-	-	4 (empat ) Tahun
13	Kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Dinas Transmigrasi Biro Pemerintahan	-	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tentang Pengembangan Potensi Daerah dan peningkatan Pelayanan Publik	-1 Tahun 2021 -2 Tahun 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertanian, peternakan dan perkebunan</li> <li>- Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak</li> <li>- Perindustrian</li> <li>- Perikanan dan kelautan</li> <li>- Peningkatan sumberdaya manusia</li> <li>- Penanganan dan penanggulangan bencana</li> <li>- Parawisata dan kebudayaan</li> <li>- Transmigrasi</li> <li>- Ketahanan Pangan</li> <li>- Perdagangan</li> </ul>	TKSD				5 (lima) Tahun

14	Kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Biro Pemerintahan dan Kesra		Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tentang Pengembangan Potensi Daerah dan peningkatan Pelayanan Publik	- 29 Tahun 2022 -120.13/046/2022	- Pengembangan Potensi Daerah Ruang lingkup meliputi seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	TKSD	-	-	-	5 (lima tahun)
15	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan RRI	Diskominfo/	-	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan LPPRRI	295/RRI-MM/III.UM.01.01/09/2024	- Pengemasan dan distribusi materi publikasi kegiatan OPD di Lingkungan Pemerintah provinsi sulawei barat		-	-	-	

Kepala Perangkat Daerah  
Biro Tata Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sulawesi Barat

Data Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, Pihak Ketiga/Swasta, Kementerian, Lembaga berbadan Hukum

No	Kerjasama Daerah/ Pihak ke III, Kementerian, Lembaga Beradab hukum	Pemrakarsa	Terpanyungi Dalam Dokumen Perencanaan alokasi Anggaran APBN/APBD	Bentuk kerjasama/ Kesepakatan/ Perjanjian Kerjasama	Nomor/Tanggal Kesepakatan Bersama	Ruang Lingkup	Difasilitasi oleh Kementerian/ Tim Koorinasi Kerjasama Daerah	Realisasi Fisik/Keuangan	Permasalahan	Solusi	Keterangan/ Jangka waktu
1	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan sosial ketenagakerjaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Badan Penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan tentang kerjasama optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Barat melalui mekanisme pelayanan terpadu satu pintu	PER/2/012022 dan 2400/99/1/2022 tanggal 24 Januari 2022	Ruang lingkup : 1. persyaratan dalam mendapatkan pelayanan publik tertentu melengkapi bukti kepesertaan BPJS ketenagakerjaan. 2. Pelaksanaan pengenaan dan pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat. 3. Penyelesaian Ketidakpatuhan Badan Usaha/Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara. 4. Peningkatan Kepatuhan Badan Usaha/Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara untuk memenuhi kewajiban 5. Sosialisasi bersama terkait pengenaan sanksi Administratif tidak mendapat Pelayanan Publik Tertentu dalam penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan  6. Evaluasi antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dilakukan secara periodik setiap 6 ( enam) bulan 7. Kerjasama lain yang disepakati PARA PIHAK	-	-	ketersediaan Sarana dan Prasarana belum memadai ( PC dan AC )	Penyediaan alokasi anggaran	2 Tahun



2	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp. 3.600.000	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Pemerintah Kabupaten Polewali tentang Gerai Pelayanan perizinan dan NonPerizinan	179 Tahun 2022 dan 415/09/PKS/II/2022 Tanggal 24 Februari 2022	<p>Ruang lingkup :</p> <p>1. Pelayanan administrasi perizinan dan nonperizinan dalam bentuk gerai.</p> <p>2. Penyiapan sarana dan prasarana pelayanan administrasi perizinan dan nonperizinan pada gerai</p> <p>3. Penyiapan sumber daya manusia dalam pemberian pelayanan administrasi perizinan dan nonperizinan pada gerai</p> <p>4. Data dan Informasi perizinan dan nonperizinan pada gerai</p> <p>5. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada gerai</p>	-	Rp. 2.000.000	<p>1. ketersediaan Sarana dan Prasarana belum memadai ( PC ) dan pasilitas pendukung lainnya</p> <p>2. Masih kurangnya informasi tentang keberadaan gerai di Kabupaten</p>	<p>1. Penyediaan alokasi anggaran</p> <p>2. Perlunya dilaksanakan kegiatan sosialisasi kepada para pelaku usaha</p>	2 Tahun
3	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Pemerintah Kabupaten Majene	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	Perjaanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Pemerintah Kabupaten Majene tentang Gerai Pelayanan perizinan dan NonPerizinan	1 Tahun 2022 dan 134.4/32/KS-Lembaga/XI/2021 Tanggal 24 Februari 2022	<p>Ruang lingkup :</p> <p>1. Pelayanan administrasi perizinan dan nonperizinan dalam bentuk gerai.</p> <p>2. Penyiapan sarana dan prasarana pelayanan administrasi perizinan dan nonperizinan pada gerai</p> <p>3. Penyiapan sumber daya manusia dalam pemberian pelayanan administrasi perizinan dan nonperizinan pada gerai</p> <p>4. Data dan Informasi perizinan dan nonperizinan pada gerai</p> <p>5. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada gerai</p>	-	-	<p>1. ketersediaan Sarana dan Prasarana belum memadai ( PC ) dan pasilitas pendukung lainnya</p> <p>2. Belum optimalnya dukungan anggaran terkait pembayaran honorer</p> <p>3. Masih kurangnya informasi tentang keberadaan gerai di Kabupaten</p>	<p>1. Penyediaan alokasi anggaran</p> <p>2. Perlunya dilaksanakan kegiatan sosialisasi kepada para pelaku usaha</p>	2 Tahun



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN

BALAI SERTIFIKASI ELEKTRONIK  
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

TENTANG

PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SISTEM ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

---

Nomor : 2 Tahun 2022

Nomor : PERJ. 96/BSSN/BS/HK.07.02/06/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (22-06-2022), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Muhammad Idris : Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, berkedudukan di Jalan Abdul Malik Pattana Endeng Rangs Mamuju Provinsi Sulawesi Barat 91512, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Jonathan Gerhard Tarigan : Kepala Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara, bertindak dalam jabatannya, berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 70, Jakarta Selatan 12550, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **"PIHAK"**.

**PARA PIHAK** menerangkan bahwa untuk menjamin keamanan Sistem Elektronik, diperlukan layanan keamanan berupa autentikasi dan integritas data dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara.

Sehubungan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **DEFINISI**

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. "Balai Sertifikasi Elektronik" yang selanjutnya disebut "BSrE" adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan sertifikasi elektronik, pengelolaan sistem sertifikasi elektronik, dan pemenuhan teknis sistem sertifikasi elektronik.
2. "Sertifikat Elektronik" adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik.
3. "Sistem Elektronik" adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
4. "Otoritas Sertifikat Digital Lemsaneg" yang selanjutnya disebut "OSD Lemsaneg" adalah sistem penyelenggaraan sertifikasi elektronik secara

keseluruhan atau salah satu/beberapa sistem penyelenggaraan sertifikasi elektronik.

5. *"Certificate Policy"* adalah ketentuan dan kebijakan yang mengatur semua pihak yang terkait dengan penggunaan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh OSD Lemsaneg.

## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kerja Sama Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan **PIHAK KESATU**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya penerapan Sistem Elektronik yang aman di lingkungan **PIHAK KESATU** dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung penerapan Sertifikat Elektronik pada layanan pemerintah;
- b. penerbitan Sertifikat Elektronik;
- c. pemanfaatan Sertifikat Elektronik dalam Sistem Elektronik pada **PIHAK KESATU**; dan
- d. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik.

## **Pasal 4**

### **KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
  - a. menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan pada pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
  - b. menyediakan data yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA** dalam rangka pemanfaatan Sertifikat Elektronik;

- c. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dengan asistensi **PIHAK KEDUA**;
- d. bertanggung jawab terhadap keamanan infrastruktur Sistem Elektronik **PIHAK KESATU**;
- e. memberikan laporan hasil *security assessment* Sistem Elektronik yang telah dilakukan oleh **PIHAK KESATU** atas permintaan **PIHAK KEDUA**;
- f. mengikuti saran dan rekomendasi **PIHAK KEDUA** terkait prosedur pengamanan Sertifikat Elektronik;
- g. memberikan laporan hasil pemanfaatan Sertifikat Elektronik kepada **PIHAK KEDUA** sesuai format yang ditentukan minimal 1 (satu) tahun sekali;
- h. mempromosikan layanan Sertifikat Elektronik **PIHAK KEDUA** kepada unit kerja di lingkungan **PIHAK KESATU** dan masyarakat;
- i. mencantumkan Logo BSrE pada setiap aplikasi yang menggunakan Sertifikat Elektronik **PIHAK KEDUA**;
- j. mencantumkan informasi pada dokumen keluaran aplikasi yang menggunakan Sertifikat Elektronik bahwa dokumen telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- k. memberikan dukungan kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyiapan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. menerbitkan Sertifikat Elektronik;
- b. menyediakan narasumber dan melakukan pendampingan pada kegiatan bimbingan teknis terkait penyiapan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
- c. memberikan asistensi kepada **PIHAK KESATU** untuk penyusunan SOP Pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
- d. memberikan dukungan teknis apabila terjadi permasalahan terkait autentikasi, keaslian data, dan anti-penyangkalan dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
- e. menyediakan dokumen *Certificate Policy*; dan
- f. melakukan penilaian kepatuhan pelaksanaan *Certificate Policy*.

## **Pasal 5**

### **HAK PARA PIHAK**

(1) Hak **PIHAK KESATU**:

- a. menerima Sertifikat Elektronik dari **PIHAK KEDUA**;
- b. mendapatkan bimbingan teknis terkait penyiapan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik dari **PIHAK KEDUA**;
- c. mendapatkan asistensi dari **PIHAK KEDUA** dalam penyusunan SOP pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
- d. mendapatkan dukungan teknis apabila terjadi permasalahan terkait autentikasi, keaslian data, dan anti-penyangkalan dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik dari **PIHAK KEDUA**;
- e. mendapatkan dokumen *Certificate Policy*; dan
- f. menerima laporan hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan *Certificate Policy*.

(2) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. mendapatkan data dari **PIHAK KESATU** dalam rangka pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
- b. mendapatkan laporan hasil *security assessment* Sistem Elektronik **PIHAK KESATU** atas permintaan **PIHAK KEDUA**;
- c. mendapatkan laporan terkait pemanfaatan Sertifikat Elektronik dari **PIHAK KESATU** sesuai format yang ditentukan minimal 1 (satu) tahun sekali;
- d. mendapatkan promosi berupa sosialisasi kepada unit kerja di lingkungan **PIHAK KESATU** dan pengguna Sertifikat Elektronik dalam Sistem Elektronik terkait layanan yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**;
- e. dicantumkan Logo BSrE pada setiap aplikasi yang menggunakan Sertifikat Elektronik **PIHAK KEDUA**;
- f. dicantumkan informasi pada dokumen keluaran aplikasi yang menggunakan Sertifikat Elektronik bahwa dokumen telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- g. mendapatkan dukungan dari **PIHAK KESATU** dalam rangka penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyiapan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**.

## **Pasal 6**

### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

## **Pasal 7**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

## **Pasal 8**

### **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik **PARA PIHAK** berdasarkan kontribusi masing-masing **PIHAK**.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik **PIHAK** yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik **PIHAK** lain, atau milik bersama dari **PIHAK** lainnya.

## **Pasal 9**

### **KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing **PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

## **Pasal 10**

### **KEADAAN KAHAR**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.



- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

## **Pasal 11**

### **EVALUASI**

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

## **Pasal 12**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK**.

## **Pasal 13**

### **PERUBAHAN**

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 14**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

**a. PIHAK KESATU**

**SEKSI PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI**  
**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK**  
**PEMPROV SULBAR**

Jalan haji Abdul Malik Pattana Endeng Rangas Mamuju Pov. Sulbar 91512

**b. PIHAK KEDUA**

**SEKSI PELAYANAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK**  
**BALAI SERTIFIKASI ELEKTRONIK**

Jalan Harsono RM Nomor 70, Jakarta Selatan 12550

Telp : (021) 50966400

Email : info.bsre@bssn.go.id

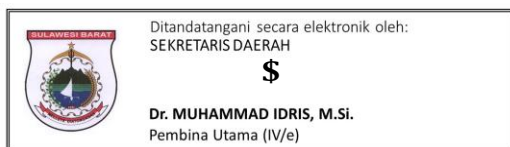
- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 15**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**



**PIHAK KEDUA**





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT  
**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN  
STATISTIK**

Jalan. H. Abd. Malik Pattana Endeng, Rangas Rangas, Simboro dan Kepulauan – Mamuju 91512  
Email [kominfo@sulbarprov.go.id](mailto:kominfo@sulbarprov.go.id) Website [www.kominfo.sulbarprov.go.id](http://www.kominfo.sulbarprov.go.id)

Mamuju, 05 Januari 2024

Nomor : B/400.13.54/2/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 2 (Dua)  
Hal : Daftar Kemitraan Media

Yth. Bapak/Ibu/Saudara(i)

1. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat
  2. Para Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat
- di

Tempat

Dalam rangka mendukung program Prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yaitu *Branding* dan *Marketing*, serta menindaklanjuti arahan Pj Gubernur Sulawesi Barat pada acara Konferensi Pers Rilis Capaian Kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di Aula Marasa Corner pada tanggal 31 Desember 2023. Bersama dengan ini, kami kirimkan daftar nama Organisasi Profesi Wartawan dan Sarekat Perusahaan Pers, serta daftar nama kemitraan media pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik pada Tahun 2024 untuk menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan kemitraan dengan Media.

Untuk melakukan kemitraan Media dapat menghubungi narahubung masing-masing ketua Organisasi yang kami lampirkan dibawah ini:

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas,



Mustari Mula, S.Sos., M.A.P.  
Pembina Utama Muda/(IV/c)  
NIP 19680424198810001

Lampiran 1 Surat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik  
Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Nomor :

Tanggal : 01 Januari 2024

---

#### **DAFTAR NARAHUBUNG KETUA ORGANISASI MEDIA**

1. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulbar  
Nama : Sulaiman  
Nomor hp/Wa : 0852 9821 9247
2. Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Sulbar  
Nama : Rahmat  
Nomor hp/Wa : 0852 9918 8884
3. Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sulbar  
Nama : Anhar  
Nomor hp/Wa : 0853 9745 3003
4. Ketua Ikatan Jurnalis Sulbar (IJS)  
Nama : Irham  
Nomor hp/Wa : 0811 4198 288
5. Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI)  
Nama : Idham  
Nomor hp/Wa : 0812 5418 0306
6. Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Sulbar  
Nama : Muhammad Said  
Nomor hp/Wa : 0822 4930 8239
7. Ketua Jurnalis Online Indonesia (JOIN) Sulbar  
Nama : Wahyuni  
Nomor hp/Wa : 0853 9923 8333
8. Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulbar  
Nama : Gusni Kardi  
Nomor hp/Wa : 0813 4386 2809

Lampiran 2 Surat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik  
Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Nomor :

Tanggal : 01 Januari 2024

#### DAFTAR KEMITRAAN MEDIA TAHUN 2024

No	Media	Nama Perusahaan	Alamat Kantor	Organisasi Media
1	Paceko. Com	PT MANDAR INDONESIA MEDIA	Jl. TVRI No.4, Kel. Simboro, Kec. Simboro Dan Kepulauan, Kab. Mamuju, Prov Sulbar	
2	Lapis News. Com	PT LAPSUS INDRIANI SEJAHTERA	Jl. Poros Mamuju Kalukku, Desa/kel. Bambu, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Prov Sulbar	Join
3	Artikel News	PT ARTIKEL MEDIA NUSANTARA	Jl. Teduh Bersinar, Komp. Griya Fajar Mas Regency I Blok A/9 Makassar, Sulawesi Selatan 90222	IWO
4	Rakyat Sulbar. Com	PT RAKYAT SULSELBAR	Jl. Gatot Subroto Mamuju Sulbar	PWI
5	Mandar Pos. Com	PT MEDIA ZAAKIYAH ALBAROKAH	Jln. Poros Mamuju-Majene Prov Sulbar	IWO
6	Malaqbipos. id	PT MITRA MALAQBI POS	Jl. Mustafa Dg. Sirua Mamuju Sulbar	IJS
7	Potret Rakyat. Com	PT PATER AMANTES MEDIAPRATAMA	Jl. Martadinata, Ling. Tambayako, Kel. Simboro, Kec. Simboro. Mamuju	IJS
8	Wacana Info	PT MULTI WACANA INTERMEDIA	Jl. Andi Dai, No. 112 Mamuju	
9	Mamuju Express. Com	PT MEDIA MAMUJU EKSPRESS	Jl. Abd Malik Pattana Endeng, Kel Rangas, Kec. Simboro Dan Kepulauan, Kab. Mamuju, Prov Sulbar	
10	Sulbar Pedia. Com	PT IMPIAN SULAWESI BARAT	Jl. Soekarno Hatta (Depan KPU Prov Sulbar) Kel. Karema, Mamuju Prov. Sulbar	Join

11	Mbs77sulbar. Com	PT REZKI ANUGRAH MEDIA GROUP	Ampallas Kel. Bebanga Kec. Kalukku Kab. Mamuju Prov Sulbar 91561	IJS
12	Mandarnews	PT. TOMARAYA MANDAR MEDIA	Jl. Lettu M. Yamin Lr. Hammaali No.02 Majene 91411	IWO
13	Sulbar Info.Com	PT BIMANTARA JAYA MEDIA	Jl. Wr. Mongingsidi No. 38 Mamuju	IJS
14	KabarSulbar. Com	PT SULBAR NEWS GROUP	JL. Diponegoro No,- Mamuju	IJS
15	8enam.Com	PT GARDA SULBAR MALAQBI	Jl. Abd Majid Pataro Pura Kec. Topoyo Kab. Mateng	IWO
16	Matta.News.Com	PT MATTA MEDIA MANDIRI	Mamuju. Jl. Pababari	IWO
17	Fokus Metro Sulbar.com	PT FOKUS METRO SULAWESI BARAT	BTN Permatasari Blok No 6 Kel. Tande Timur Kec. Banggae Timur Kab. Majene Prov. Sulbar	JMSI
18	Sulbar.kini.com	PT KUMPARAN HARAPAN BARU	Jl. Martadinata, Kel. Simboro , Kab. Mamuju Sulbar	IWO
19	Maleo Sulbar	PT. MALEO SULBAR GROUP	Jl. Sultan Hasanuddin, Kel. Binanga, Kec. Mamuju, Prov Sulbar	IJS
20	Pena.sulbar.co.id	PT SINAR BAHAGIA MULTIMEDIA	Jl. Nuri Mamuju	Join
21	Katinting.com	PT ARENA MULTIMEDIA INDONESIA	BTN. Axuri Blok E. No. 17 Dahlia VI Kab. Mamuju Sulbar	AMSI
22	Berita Nasional.id	PT MEDIA BAKRI CENTRE		Join
23	Sulbar Express	PT SULAWESI BARAT EKSPRESS	Graha Pena, Jl. Jend. Sudirman No. 50 Mamuju-Sulbar	PWI
24	Cyber News Nasional	PT MEDIA CITRA NAGARI NASIONAL	Jln. Usman Jaffar Samping UNIMAJU Depan Stadion Manakarra Mamuju Sulbar	Join
25	Sulbar Online.com	PT MEDIA	Jl. Kurungan Bassi, Kel.	IJS

		SULBAR PRATAMA	Rimuku Mamuju, Prov Sulbar	
26	Deskriptif.co.id	PT. TERAS SULBAR INTERMEDIA	JL. Angsa No. 27 Rimuku Kelurahan Rimuku, Kec. Mamuju Kab. Mamuju, Sulbar 91515	AJI
27	Peladenindonesia.com	PT. PELADEN KREASI INDONESIA	Perumahan Zarindah Blok No. 13 Kel. Simboro, Kec. Simboro, Kab. Mamuju, Sulbar	PWI
28	Radar Sulbar.co.id	PT. RADAR SULAWESI BARAT	Graha Pena Jln. Jend. Sudirman No. 50 Mamuju Sulbar	PWI
29	I NEWS TV	PT. SEMESTA PESONA TELEVISI	Jl. Kurungan Bassi No-Mamuju	
30	Beranda Rakyat.com	PT. SAHABAT SULAWESI ONLINE		IWO
31	Portal Insiden	PT. INSIDEN INTERMEDIA UTAMA	BTN Maspul Blok A2 No. 18 Mamuju Sulbar	PWI
32	PT Sulbar Express	PT. SULAWESI BARAT EKSPRESS	Jl. Jend. Sudirman No. 50 Kel. Simboro, Kec. Simboro Dan Kepulauan , Kab. Mamuju, Prov Sulbar	PWI
33	Mamuju Pos.com	PT. MITRA MAMUJU POS	Jl. Martadinata No.-Mamuju	PWI
34	Liputan 6.com	PT. CITRA LIMA MUDA	Jl. Rappocini Raya Lr.8 No.3	
35	Rakyatta.co	PT. MEDIA SULAWESI BARAT	Jl. RE Martadinata Tambayako, Simboro, Mamuju	IJS
36	Beritaini.com	PT. BERITAINI MEDIA INTERNUSA	BTN Puri Mutiara II Blok A5 No. 10	AJI
37	Sulbar Terkini.id	PT. SAFARI MEDIA NUSANTARA	JL. Abdul Malik Pattana Endeng, Kel Rangas, Kec Simboro Mamuju Prov. Sulbar	IJS
38	Telegraph.id	PT. TELEGRAPH MEDIA PERKASA	Jl. Angsa No. 27 Mamuju-Sulbar	AJI



39	Sandeq pos News	PT. SANDEQ POS ALAMANDAR	Jl. Balai Latihan Kerja No. 07 Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene	AJI
40	Bugis Pos.com	PT. BUGISPOS TUJUA UTAMA	Jl. Lasuloro Dalam VI/37 Makassar	IWO
41	Radar Sulbar	PT. RADAR SULAWESI BARAT	Graha Pena Jln. Jend. Sudirman No. 50 Mamuju Sulbar	PWI
42	Mandarnesia.com	PT. MANDAR SIBER INDONESIA	Jl. Padang Bulan, Kelurahan Karema , Kec. Mamuju Kab. Mamuju Sulbar	Aji
43	Fajar.co.id	PT. MEDIA FAJAR KORAN	Makassar	
44	Ujungpandang Ekspress	PT. FAJAR UJUNG PANDANG INTEREDIA	Jl. Jend Sudirman Kav . 1 Karema Selatan (Depan Richest Sport Centre) Mamuju Sulbar 91512	
45	Maraya.news	PT. CELEBES CITRA INFORMATIKA	Jl. Husni Tamrin, Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju, Prov Sulbar	PWI
46	Masalembo.com	PT. FOKUS MEDIA SULBAR	Jl. Martadinata, Kel. Simboro, Kec. Simboro Kab. Mamuju, Prov Sulbar	AJI
47	Malaqbi.com	PT. MALAQBI NUSANTARA	Jl. Kurungan Bassi No- Mamuju	AJI
48	Antara News		Jl. A.P. Pettarani Blok A- 30 Makassar 90222	
49	Tribun Sulbar.com	PT. BOSOWA	Jl. Martadinata Ruko	

		MEDIA GRAFIKA	Blok B No. 2 Mamuju, Sulbar	
50	Kareba1.com	PT. KAREBA SATU MULTIMEDIA	Jl. Sultan Hasanuddin Mamuju Sulbar	
51	Su warta.com	PT. SULBAR NUSANTARA MEDIA	Jl. Rajawali Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju Prov Sulbar	
52	Vmsnews.net	PT. VERITAS MULTIMEDIA SEMESTA	Jl. Soekarno Hatta Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Sulbar	AJI
53	Kabardesa.co.id	PT. MEDIA KABAR DESA	Jl. Bau Baharuddin No 02 Sengkang, Kel Bulu Pabbulu, Kec. Tempe, Kab. Wajo, Prov. Sulawesi Selatan	Join
54	Moderasi	PT. MEDIA MANDIRI EDUKASI	Kab. Mamuju	PWI
55	2enam.com	PT. MARIO DUA ENAM	Jl. Ranggong No. 40, Rimuku, Mamuju, Sulbar	IJS
56	Indigo99.com	PT. MULTIMEDIA POJOK CELEBES	Jl. Martadinata, Komp. BTN Zarindah 5 Blok N.42 Kel. Simboro Kab. Mamuju Prov. Sulbar	JMSI
57	Banniq.id	PT. BANNIQ KREASI MEDIA MANDIRI	Komp. BTN Graha Pelabuhan Permai (Maspul) Mamuju	PWI
58	Relaksi Publik.id	PT. EVEREST SAGARMATHA NUSANTARA	Link. Tambi, Kel. Mamuju, Kec. Mamuju	IWO
59	Lensa Khatulistiwa.com	PT. MULTIMEDIA SANDAPANG KHATULISTIWA	Jln. Abdul Malik Pattana Endeng BTN Puri Pesona Zarindah Blok 1/12 Kelurahan Simboro, Kec Mamuju Sulbar 91512	IWO
60	Dikita.id	PT. DIKITA MULTIMEDIA	Jl. Pangeran Diponegoro, Kab. Mamuju, Sulbar- Indonesia	AJI

61	SULBARPOS	PT. MITRA CINEMA INDONESIA	BTN Masannang 2 Jl. Diponegoro Mamuju	IWO
62	Komunika Nusantara.com	PT. MEDIA KOMUNIKA NUSANRA	Jl. ABD Syakur, Karema, Mamuju, Sulbar	
63	Sulbarta.com		Jln. Martadinata, Kel. Simboro, Kab Mamuju, Prov Sulbar	
64	Media Ekspres	PT. IKFA MEDIA EDUKASI	Jl. H. Ir. Djuanda No. 06. Komp. Perumahan Bumi Tomakaka Permai (BTP) Depan Kampus Unika Mamuju-Sulbar	IJS
65	CNN INDONESIA	PT. TRANS NEWS CORPORA	Gedung Transmedia Lt. 3 Jl. Kapten Tendean KAV 12-14A. Mampang Prapatan Jakarta Selatan, DKI Jakarta Raya	
66	KOMPAS TV	PT. CIPTA MEGASWARA TELEVISI	Jl. Palmerah Selatan No. 1 Gelora, Jakarta Pusat	
67	DETIKCOM	PT. TRANS DIGITAL MEDIA	Gedung Trans TV Lt. 8 Jl. Kapten Tendean Kav. 12- 14A Jakarta Selatan	
68	SINDO NEWS.COM	PT. MEDIA NUSANTARA SULAWESI	Jl. Andi Djemma No. 1 E, Kel. Mamajang Dalam, Kec. Mamajang, Kota Makassar, Prov Sulsel	
69	tvOne	PT. LATIVI MEDIA KARYA	Jl. RawaTerate II No. 2 Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta 13260 Indonesia	
70	INFOKOM ELEKTRINDO	PT. INFOKOM ELEKTRINDO	MNC Tower 25, Floor, Jl. Kebon Sirih 17-19 Jakarta	

71	TVRI		Jl. TVRI, Perkantoran Rangas Mamuju-Sulbar 91512 Indonesia	
72	KOREKSINEWS.ID	PT. BERJAYA MEDIA GROUP	Jl. Kelapa Tujuh Baru No. 88 Mamuju, Sulbar	IJS
73	Pattae.com	PT. PATTAE DIGITAL MULTIMEDIA	Jl. Elang BTN. Graha Safa Marwah Kec. Polewali Kab. Polman	
74	Daulat Rakyat	PT. MEDIA DAULAT RAKYAT	Jl. Malino No. 90 Kel. Tamarunang Kec. Sombaopu Kab. Gowa Prov Sulsel	PWI
75	Ide-ta.com	PT. SURYA BENTENG KAYU MANGIWANG	Jl. Pattalundru, Kel. Binanga, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Sulbar	IWO
76	Kompas 86.com	PT. INDONESIA MONITORING NEWS	Jl. Hapati Hasan, Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju Prov Sulbar	
77	Warta Amperak	PT. SUARA MEDIA AMPERAK	Dusun Jombang, Desa/Kelurahan Sugihwaras, Kec. Wonomulyo, Kab Polewali Mandar, Prov Sulbar	
78	Kilas Indonesia	PT. MEDIA KILAS INDONESIA	Jl. IR Juanda BTN Iele Udung No. 3 Mamuju- Sulbar	

79	Pos Kota	PT. INTI MEDIA SULAWESI SELATAN	Perumahan Taman Sudiang Indah Blok 14 No. 4, Kel. Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Prov Sulsel	
80	Tribun Timur	PT. BOSOWA MEDIA GRAFIKA	Jl. Cendrawasih No. 430 Makassar	
81	Mata Lensa	PT.DYFA MEDIA PRESTASI	Jl. Poros Salupangi- Pamombang Kec. Simboro Kab. Mamuju Sulbar	
82	Rakyat Sulsel.co	PT. RAKYAT SULAWESI SELATAN INTERMEDIA	Jl. Sultan Alauddin, Komplek Ruko Permatasari No.25 Makassar	
83	Kompas.com	PT. KOMPAS CYBER MEDIA	Cyber 2 Tower Lantai 31 D, Jl. HR. Rasuni Said Blok X-5 No. 13, Jakarta 12950	
84	Bidik Nasional	PT. BIDIK NASIONAL MEDIA GROUP	JL. Teuku Umar 11 Lr 3 No. 26. Desa/Kelurahan Bodoa, kec Tallo. Kota Makassar. Pro Sulbar	
85	LPP RRI		Jl. Riburane No. 3	
86	Jalur Info Sulbar	PT. JALUR INFO SULBAR	Gedung Graha Pena, Jl. Urip Sumoharjo No. 20 Makassar, Kel. Kuruwisi Utara, Kec. Panakkukang, Kota Mksr, Prov Sulsel	

87	Editorial9.com	PT. MANDAR JAYA INTERMEDIA	Desa Bumiayu Kec. Wonomulyo, Kab Polewali Mandar, Prov Sulbar	AJI
88	Delik.id	PT. DELIK MEDIA JAYA	BTN Soreang Permai Blok N/1 Pare-Pare	
89	Koridor.id	PT. KORIDOR INDONESIA INTERMEDIA	Jl. HM Arsyad BTN Soreang Permai No 12 Kota Pare-Pare	
90	Sandeq.co.id	PT. MEDIA SANDEQ MEDIA GROUP	Komp. BTN Bumi Reskita Permai Blok M no 10 Matakali Kab. Polman Prov Sulbar	
91	Periksa21.co.id	PT. MEDIA SARWANI RAYA	BTN VILLA MAS CENDRAWASIH BLOK A1 NO 35 POLMAN	
92	Radar Istana.com	PT. MEDIA TAMA SARANA INFORMASI	Jl. Raya Bambu Kuning Kota Bekasi	
93	Inisulbar.com	PT. BELAJANG MEDIA INDONESIA	Jl. Poros Mjne Mmj, Desa Salletto Kec. Simboro Mmju	
94	SulbarSatu.com	PT. KLIK WARTA INDO	Ruko Pasar Baru Mamuju Jl. Abd Syakur, Kel. Karema-Mamuju	
95	Kabar Celebes.com	PT. SINERGI SURYA CELEBES	Jl. Sungai Saddang Blok A13 No. 7 Makassar	
96	Rakyat.news	PT. MATA GRUP NUSANTARA	Kntor Korwil : Jl. Usman Jafar Mmj-Sulbar	
97	Solusinews.id	PT. SOLUSI INTI MEDIA	Jl. Tidung V Blok 16 No. 3 Makassar, Sulsel	

98	Nuansa Terkini.news	PT. NUANSA TERKINI MEDIA	Jl. Tinumbu Lr. 142 No.60 Rt.003 Rw.004 Bunga Ejaya, Kel. Bontoala Kota Mkssr Sulsel	
99	Indonesia Satu.co.id	PT. JURNALIS INDONESIA SATU	Jl. Malik Pattana Endeng Mamuju Sulbar	
100	rmol.sulbar.id		Mamuju	
101	Poros Sulbar.com	PT. SULBAR NEWS GROUP	Jl. Diponegoro Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju Prov Sulbar	IJS
102	Seputar Sulbar.com	PT. JURNALIS BUSER DUA PULUH EMPAT	Mamuju	IJS
103	Jalur Nusantara.co	PT. SEMBILAN SAHABAT NUSANTAR	Jl. Abdul Syakur Kel. Karema Kec. Mamuju Sulbar	
104	Global Sulbar.com	PT. MEDI GLOBAL SULBAR	Jl.Rajawali Padang Baka, Mamuju Sulawesi Barat	IWO
105	99NEWS.ID	PT. MEDIA SEMBILAN BERLIAN	Jl. BTN Leppe blok M No.5kec. Banggai Timur, kab. Majene	jmsi
106	Karabao.id	PT.Karabao Sembilan Media	Jl. Buraerah Lingkungan Garogo Kab. Majene	jmsi
107	99SULBAR NEWS.COM	PT.SULBAR SEMBILAN MEDIA	Jl. Labora Camba Utara Kec. Banggae. Kab. Majene	jmsi
108	MONTANA. CO.ID	PT. REPORTASE JAYA MULTIMEDIA	Mamuju	AJI
109	NUANSA INFO	PT. MENARA QUANTUM INTER MEDIA	Mamuju	IWO
110	TERAS SULBAR.COM	PT. TERAS SULBAR INTERMEDIA	Mamuju	AJI
111	SULBAR KITA.COM	PT IMPIAN SULAWESI BARAT	Mamuju	IWO
112	MODERASI.CO.ID	PT. MEDIA MANDIRI EDUKASI	Manuju	PWI
113	PRANALA.CO	PT. WINARA ETAM MEDIA		

114	CHANEL SULBAR.COM	PT. SULBAR CHANEL SEMBILAN	Jl. Lutang Salabulo, Tande Timur, kec banggae Timur, m kab. majene	JMSI
115	POINSEMBILAN.COM	PT. POIN SEMBILAN MEDIA	Jl. Salabulo, kec. banggae, kab. majene	JMSI
116	MENIT SULBAR	PT. MENIT SULBAR MEDIA	Jl. RA. Kartini Nomor 12. kel pangaliali, kec banggae, kab. majene	JMSI





**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
DINAS KOMINFO, PERSANDIAN, DAN STATISTIK SULAWESI BARAT  
DAN  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MAMUJU  
TENTANG  
PEMANFAATAN APLIKASI RRI NEWS DAN KANAL WEBSITE RRI.CO.ID  
SEBAGAI SARANA PUBLIKASI KEGIATAN OPD DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

NOMOR : 295/RRI-MMJ/III.UM.01.01/09/2024

NOMOR :

---

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (3-9-2024) bertempat di Mamuju, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Mustari Mula, S.Sos., M.AP** : Kepala Dinas Kominfo, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kominfo, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat, yang berkedudukan di Jalan Abd. Malik Pattana Endeng, Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Malikam Sangaji, S.PT** : Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Mamuju yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Mamuju, yang berkedudukan di Jalan R.E Martadinata, Simboro, Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Dinas Kominfo, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersil, berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat, dan mengemban tugas menyelenggarakan kegiatan penyiaran pelayanan umum; dan
- c. Bahwa **PARA PIHAK** perlu mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka pemanfaatan aplikasi RRI News dan kanal website rri.co.id sebagai sarana publikasi kegiatan OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat saling mengikat diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk melaksanakan kerja sama koordinasi antara **PARA PIHAK** dalam rangka pemanfaatan aplikasi RRI News dan kanal website **rri.co.id** sebagai sarana publikasi kegiatan OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat; dan
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama dan koordinasi antara **PARA PIHAK** agar dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya secara efektif dalam rangka pemanfaatan aplikasi RRI News dan kanal website **rri.co.id** sebagai sarana publikasi kegiatan OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Penyediaan fasilitas yang dapat digunakan dalam rangka pemanfaatan aplikasi RRI News dan kanal website **rri.co.id** sebagai sarana publikasi kegiatan OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
- b. Pengemasan dan distribusi materi publikasi kegiatan OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
- c. Penyediaan sumber daya dalam rangka publikasi kegiatan OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
- d. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disepakati lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama; dan
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana yang dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk **PARA PIHAK**.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**; dan
- (3) Pihak yang berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memberitahukan kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.



**Pasal 5**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk **PARA PIHAK** sebagai berikut:

**a. PIHAK KESATU**

Narahubung : Dian Afrianty, S.Ksi., M.Si  
Alamat : Jl. TVRI  
Telepon : 0813 4353 1982  
Website : kominfo.sulbarprov.go.id  
Email : afriantylian@gmail.com

**a. PIHAK KEDUA**

Narahubung : Irsun Hikmawan  
Alamat : Jalan Martadinata, Simboro, Mamuju  
Telepon : 0812 1026 9043  
Website : www.rri.co.id  
Email : hikmawanirsum2@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan narahubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis;

**Pasal 6**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan  
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi.

**Pasal 7**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 8**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya dalam hal :  
a. Perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini; dan

- b. Keadaan kahar (*force majeure*), antara lain, kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari Pihak yang terkena; dan
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf a wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya.

**Pasal 9**  
**KETENTUAN LAIN**

- (1) Nota kesepahaman ini tunduk pada ketentuan perundang -undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan
- (2) **PARA PIHAK** sepakat menyatakan Nota kesepahaman ini tidak menimbulkan akibat hukum bagi **PARA PIHAK**.

**Pasal 10**  
**PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Mamuju pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan dan diterima oleh **PARA PIHAK** pada saat selesai ditandatangani.

**PIHAK PERTAMA**

Kepala Dinas Kominfo, Persandian,  
dan Statistik Sulawesi Barat

  
Mustari Mula, S.Sos., M.AP

**PIHAK KEDUA**

Kepala Lembaga Penyiaran Publik  
Radio Republik Indonesia Mamuju

  
Malikam Sangaji, S.PT